

Analisis Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Ketimpangan Antarwilayah di Indonesia

Adinda Nurayu Sentari ^{a,1,*}, Edy Santoso ^{b,2}, Aisah Jumiati ^{c,3}, Regina Niken Wilantari ^{d,4},
Sebastiana Viphindrartin ^{e,5}, Abdul Fatah ^{f,6}, Suparman ^{g,7}

^{a,b,c,d,e,f,g} Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jember, Jln. Kalimantan 37, Jember 68121, Indonesia,

¹adinda.sentari@gmail.com*; ²edysantoso@unej.ac.id; ³aisahjumiati@gmail.com; ⁴reginanikenw.feb@unej.ac.id;

⁵sebastiana@unej.ac.id; ⁷ab.fath87@gmail.com; ⁸suparman.feb@unej.ac.id

* Corresponding author

ARTICLE INFO

Article history

Received 7 May 2025

Revised 28 May 2025

Accepted 30 May 2025

ABSTRACT

Indonesia as a developing country is currently in the economic development phase. Economic development that is not uniform between one region and another will cause development inequality between regions. This inequality is an important issue because Indonesia's territory is vast and consists of various islands with their own characteristics. The Williamson Index is used to measure the level of inequality in research. Government intervention with fiscal decentralization policies is considered an alternative to solving the problem of inequality. This study aims to analyze the effect of fiscal decentralization in the form of PAD, DBH, and DAU on development inequality between regions in Indonesia. The data used in this study are secondary data covering data from 33 provinces in Indonesia from 2016-2022. The method used in this study is the panel data regression analysis method. The results of the study show that PAD has a negative and significant effect on inequality, DBH has a negative but not significant effect on inequality, and DAU has a negative and also significant effect on inequality between regions in Indonesia.

Keywords

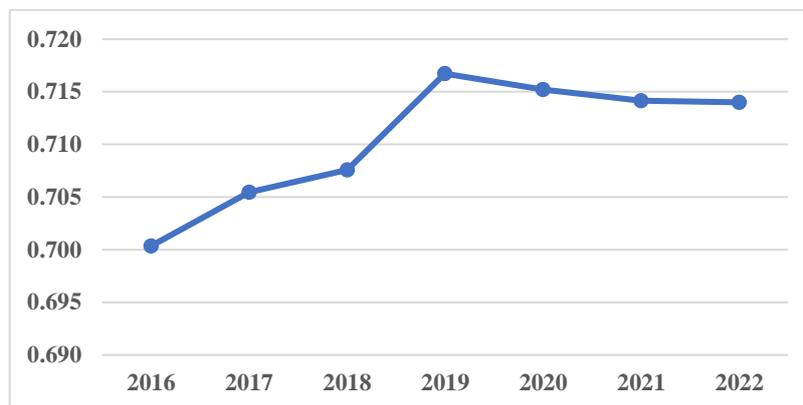
Development Inequality, Locally-Generated Revenue, Revenue Sharing Fund, General Allocation Fund

1. Pendahuluan

Indonesia sebagai negara berkembang, perekonomiannya saat ini sedang mengalami tahap pembangunan. Indonesia secara alami memiliki beragam karakteristik wilayah yang berbeda, maka hal ini akan membuat pola pembangunan antarwilayah di Indonesia menjadi tidak seragam. Ketidakteraturan inilah yang mempengaruhi kemampuan dari setiap wilayah untuk dapat berkembang. Adanya perbedaan ini juga yang nanti pada akhirnya akan berkontribusi terhadap ketimpangan antarwilayah yang terjadi di Indonesia (Gratia & SBM, 2020). Adanya permasalahan ketimpangan ini dapat menyebabkan munculnya dampak buruk bagi negara kita, maka permasalahan ketimpangan antarwilayah ini masih menjadi isu dan agenda penting dalam rencana pembangunan nasional (Nasution, 2020).

Tingkat pendapatan daerah, modal manusia, ketersediaan layanan dasar dan infrastruktur hingga kondisi dari geografis wilayah juga menjadi penyebab terjadinya ketimpangan di Indonesia. Adapun tingkat ketimpangan pembangunan antarwilayah dapat diukur dengan menggunakan Indeks Williamson (Santi & Iskandar, 2021). Berdasarkan gambar 1 menunjukkan dalam kurun waktu tujuh tahun terakhir

ketimpangan antarwilayah yang terjadi pada Indonesia, dengan menggunakan indeks Williamson masih tergolong kedalam kategori ketimpangan yang tinggi, karena hasil dari pengukurannya yang mendekati angka 1.



Gambar 1 Ketimpangan di Indonesia 2016-2022

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024 (Data diolah)

Dalam analisisnya terhadap teori pertumbuhan ekonomi Neo-Klasik, Douglas (1956), mengemukakan masalah mengenai ketimpangan pembangunan antarwilayah yang terjadi. Teori ini memperkirakan hubungan antara ketimpangan pembangunan dan pembangunan ekonomi nasional sebuah negara, yang dikenal dengan hipotesis Neo-Klasik (Sjafrizal, 2018).

Maka dalam hal ini, adanya intervensi kebijakan dari pemerintah memiliki peranan yang penting untuk dapat meningkatkan kualitas dari proses pembangunan dan menurunkan ketimpangan antarwilayah yang sedang terjadi (Sisilia & Harsono, 2021). Salah satu kebijakan yang dianggap dapat menjadi alternatif dalam menyelesaikan masalah ketimpangan adalah kebijakan desentralisasi (Santi & Iskandar, 2021). Wujud dari diterapkannya desentralisasi fiskal di Indonesia adalah dengan adanya dana perimbangan yang dapat berupa Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU), kemudian pemerintah daerah juga diberikan wewenang untuk mengatur besaran dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sendiri. Adanya penerimaan daerah ini dapat dialokasikan pemerintah daerah untuk dapat meningkatkan pembangunan sesuai dengan kebutuhan dari wilayahnya (Sabilla & Kirana Jaya, 2014).

Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh (Fadli, 2016), menunjukkan hasil bahwasannya PAD, DBH, dan DAU berpengaruh secara negatif signifikan terhadap ketimpangan wilayah di Indonesia. Penelitian yang dilakukan (Azizi, 2018), mendapat hasil bahwa DBH negatif signifikan mempengaruhi terhadap ketimpangan PDRB yang terdapat di wilayah Sulawesi Selatan. (Alfurqani et al., 2021), yang melakukan penelitian dengan hasil DAU berpengaruh secara signifikan dan negatif terhadap ketimpangan pembangunan yang ada di Provinsi Riau. Sedangkan (Sidik et al., 2020), melakukan penelitian dengan hasil DAU signifikan positif mempengaruhi ketimpangan, dan DBH positif tidak signifikan mempengaruhi ketimpangan antardaerah di wilayah Jambi. Hasil berbeda ditunjukkan dari penelitian (Oktaviani et al., 2017), yang menunjukkan hasil DBH signifikan positif dan DAU tidak signifikan positif mempengaruhi terhadap ketimpangan pembangunan di wilayah Jambi. (Alfiansyah & Budyanra, 2020), menunjukkan hasil PAD berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap ketimpangan antarwilayah di Provinsi NTT. Dan penelitian yang dilakukan (Adriana, 2020) menunjukkan hasil PAD positif dan tidak signifikan mempengaruhi ketimpangan antarwilayah di Indonesia.

Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini karena sejumlah penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang berbeda dengan variabel dependen yang berbeda pula, jarang penelitian yang

menggunakan variabel dependen seperti pada penelitian ini. Dengan penelitian ini akan membuktikan apakah terdapat pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen.

2. Tinjauan Pustaka

Teori Pembangunan Ekonomi

Todaro dan Smith (2012), menyatakan pembangunan ekonomi tidak hanya membahas mengenai peningkatan pendapatan nasional, namun juga berfokus untuk membahas mengenai pengurangan kemiskinan, ketimpangan pembangunan wilayah, dan mengatasi pengangguran yang dapat mencerminkan kualitas dari adanya pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah (Savitri & Ashar, 2023). Dalam urgensi proses pembangunan ekonomi kebijakan desentralisasi dibutuhkan agar pemerintah daerah dapat secara langsung turun tangan untuk membantu dalam mengelola pembangunan ekonomi (Muammil & Senuk, 2015). Teori model dua sektor Lewis (1950) menyebutkan bahwa ketertinggalan ekonomi disebabkan oleh pemanfaatan dari sumber daya yang kurang optimal, yang muncul dari faktor-faktor struktural atau kelembagaan yang berakar pada dualisme, baik domestik maupun internasional (Todaro & Smith, 2015).

Teori Ketimpangan Wilayah

Solow-Swan (1956), memperkenalkan teori pertumbuhan ekonomi Neo-Klasik yang berasumsi bahwa adanya hubungan pertumbuhan ekonomi wilayah yang dibarengi dengan ketimpangan wilayah. Fenomena ini biasa terjadi pada tahap awal pembangunan di wilayah berkembang dan dalam waktu jangka panjang kesenjangan itu akan cenderung berkurang seiring dengan semakin mampunya wilayah tersebut (Savitri & Ashar, 2023). Douglas (1956), menganalisis konsep dari teori pertumbuhan ekonomi Neo-Klasik ini dan memperkenalkan ide mengenai ketimpangan antarwilayah. Ia kemudian menemukan bahwa terdapat hubungan antara pembangunan ekonomi nasional sebuah negara dengan ketimpangan pembangunan antarwilayah. Konsep ini yang kemudian berkembang menjadi sebuah hipotesis, saat ini kita kenal dengan Hipotesis Neo-Klasik. Kemudian Williamson (1966), menguji hipotesis ini secara empiris dengan melakukan penelitian tentang ketimpangan pembangunan antarwilayah pada negara maju dan negara berkembang dengan data *cross section* serta *time series*. Hasilnya menunjukkan adanya kebenaran dari teori hipotesis Neo-Klasik ini (Sjafrizal, 2017).

Myrdal (1957) dalam teori penyebab kumulatif, mengatakan bahwa dampak negatif dari *backwash effect* cenderung memperburuk ketimpangan wilayah. Meski begitu dalam jangka panjang, *spread effect* bisa mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah terbelakang. Proses dari pembangunan wilayah ini bersifat saling memperkuat, sehingga perbedaan pada tingkat pertumbuhan cenderung ada dan bahkan semakin besar dari waktu ke waktu (Wei, 2015).

Teori Federalisme Fiskal

Federalisme Fiskal yang mempelajari tentang bagaimana wewenang pajak dan pengeluaran anggaran dibagi dan diatur di berbagai tingkat pemerintahan, seperti pemerintah pusat, provinsi, dan daerah (Chenge, 2024). Teori federalisme fiskal pada generasi pertama khususnya menurut Musgrave (1959) dan Oates (1972) menjadi dasar dalam konsep desentralisasi fiskal, yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan pemerataan dalam pengelolaan keuangan pemerintahan (Slavinskaitė et al., 2019). Musgrave (1959) memperkenalkan tiga cabang utama keuangan publik, dalam teori federalisme fiskal yaitu, stabilisasi ekonomi, distribusi pendapatan, dan alokasi sumber daya. Menurut Musgrave (1959), pemerintah pusat dinilai lebih efektif untuk menjalankan fungsi dari stabilisasi ekonomi dan distribusi pendapatan. Sedangkan pemerintah daerah akan melaksanakan fungsi alokasi sumber daya melalui desentralisasi (Oates, 1972; Sidig, 2018).

Desentralisasi Fiskal

Desentralisasi akan meningkatkan penerimaan wilayah melalui pengelolaan sumber daya yang lebih baik dan peningkatan kapasitas pada administrasi lokal. Namun, jika hal ini tidak diimbangi dengan kebijakan alokasi yang efektif, maka desentralisasi dapat berpotensi untuk memperburuk ketimpangan. Wilayah yang lebih maju kemungkinan memiliki sumber daya yang lebih banyak dan kemampuan untuk mengumpulkan pajak yang lebih baik, daripada wilayah yang terbelakang mungkin tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar dari wilayah mereka (Bird & Vaillancourt, 1998).

Menurut UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, implementasi dari desentralisasi fiskal diarahkan kepada pencapaian program prioritas pembangunan, pemerataan dan kesejahteraan masyarakat yang ada di seluruh wilayah Indonesia (Deslina, 2024).

3. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian eksplanatori, dengan pendekatan pada metode kuantitatif. Jenis data yang digunakan adalah data panel, dengan sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), dan Kementerian Keuangan (KEMENKEU) Republik Indonesia. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*, dengan menggunakan 33 provinsi dari 34 provinsi yang ada di Indonesia, dan mengeluarkan Provinsi DKI Jakarta dalam penelitian. Dengan jangka waktu dari tahun 2016-2022.

Indeks Williamson dalam penelitian ini digunakan untuk mengukur ketimpangan antarwilayah yang terjadi dengan formulasi sebagai berikut:

$$IW = \frac{\sqrt{\sum(Y_i - Y)^2 f_i / n}}{Y}$$

dimana:

IW	= Indeks Williamson	F _i	= Jumlah penduduk di Provinsi i
Y _i	= PDRB per kapita Provinsi i	n	= Jumlah penduduk Nasional
Y	= PDRB per kapita rata-rata Nasional		

Untuk analisis dalam penelitian ini menggunakan regresi data panel, dimana model ini diharapkan mampu untuk mengurangi variabel yang terlewatkan (*omitted variables*) dan dapat menyelesaikan korelasi antara variabel independen yang dapat menghasilkan penilaian regresi yang tidak akurat (Lamba et al., 2019). Maka persamaan regresi data panel dalam penelitian ini dapat dituliskan sebagai berikut:

$$DISP_{it} = \alpha + \beta_1 LPAD_{it} + \beta_2 LDBH_{it} + \beta_3 LDAU_{it} + e_{it}$$

dimana:

DISP _{it}	= Ketimpangan Wilayah di Provinsi (i) tahun ke (t)
α	= Konstanta
β ₁	= Koefisien regresi PAD
β ₂	= Koefisien regresi DBH
β ₃	= Koefisien regresi DAU
t	= <i>time series</i> (Tahun 2016-2022)
i	= <i>cross section</i> (33 Provinsi)
LPAD _{it}	= Logaritma Pendapatan Asli Daerah (i) tahun ke (t)
LDBH _{it}	= Logaritma Dana Bagi Hasil (i) tahun ke (t)
LDAU _{it}	= Logaritma Dana Alokasi Umum (i) tahun ke (t)
e	= <i>error term</i>

Selain itu, dalam estimasi model ekonometrika, dilakukan analisis yang lebih mendalam. Hal ini dilakukan dengan menggunakan efek regresi melalui tiga pendekatan model, dimana terdapat tiga pendekatan yang dapat digunakan dalam mengestimasi parameter model regresi data panel:

- 1) Model *Common Effect*: asumsi dalam metode ini bahwa nilai intersep dari masing-masing variabel sama, begitu pula dengan *slope* koefisien untuk semua unit (Firman Alamsyah et al., 2022).
- 2) Model *Fixed Effect*: asumsi bahwa terdapat efek yang berbeda antar variabel yang dapat diakomodasi melalui perbedaan pada intersepanya. Dalam model ini setiap variabel merupakan parameter yang tidak diketahui dan akan diestimasi dengan menggunakan teknik variabel *dummy* (Firman Alamsyah et al., 2022).
- 3) Model *Random Effect*: model ini akan mengestimasi data panel, jika variabel gangguan mungkin saling berhubungan antar waktu atau antar variabel. Model ini muncul yang bertujuan untuk mengatasi masalah yang dapat timbul pada model sebelumnya (Firman Alamsyah et al., 2022).

Pemilihan Model Terbaik dalam Regresi Data Panel

1. Uji Chow

Merupakan uji untuk menentukan apakah teknik regresi data panel dengan metode *fixed effect* lebih baik daripada regresi dengan model tanpa variabel *dummy* atau metode *common effect*. Dengan hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut:

H₀: Model *Common Effect* (CEM)

H₁: Model *Fixed Effect* (FEM)

2. Uji Hausman

Uji yang dilakukan untuk menentukan model terbaik di antara *fixed effect* atau *random effect* yang akan digunakan, uji ini didasarkan pada ide bahwa *Least Squares Dummy Variables* (LSDV) dalam metode *fixed effect* dan *Generalized Least Squares* (GLS) dalam metode *random effect* adalah efisien. Sedangkan *Ordinary Least Square* (OLS) dalam metode *common effect* tidak efisien (Akhadi, 2023). Dengan hipotesis uji Hausman sebagai berikut:

H₀: Model *Random Effect* (REM)

H₁: Model *Fixed Effect* (FEM)

3. Uji *Langrange Multiplier*.

Uji yang dilakukan untuk menentukan model terbaik antara *common effect* atau *random effect*, uji ini dikembangkan oleh Breusch-Pagan. Dimana pengujian didasarkan pada residual dari metode *common effect* (Akhadi, 2023). Maka hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut:

H₀: Model *Common Effect* (CEM)

H₁: Model *Random Effect* (REM)

Uji Statistik

1. Uji F, uji ini menggunakan $\alpha = 5\%$, maka pengujian hipotesisnya adalah sebagai berikut:
 - H₀: jika F probabilitas $\geq \alpha$, maka H₀ diterima dan H₁ ditolak, yang berarti bahwa tidak ada pengaruh signifikan antara variabel independen dengan variabel dependen.
 - H₁: jika F probabilitas $\leq \alpha$, maka H₀ ditolak dan H₁ diterima, yang berarti bahwa ada pengaruh signifikan antara variabel independen dengan variabel dependen.
2. Uji t, menggunakan taraf signifikan sebesar 0,05 ($\alpha = 5\%$) dengan kebebasan, $df = (n - k - 1)$ yang mana k merupakan variabel independen (Widodo, 2022). Maka hipotesisnya adalah sebagai berikut:
 - Jika nilai signifikan $> 0,05$ maka secara hipotesis ditolak. Berarti bahwa secara parsial variabel independen tidak mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.
 - Jika nilai signifikan $< 0,05$ maka secara hipotesis diterima. Berarti bahwa secara parsial variabel independen tersebut mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.

3. Analisis Koefisien Determinasi R^2 , dengan nilai yang berkisar antara 0 sampai dengan 1. Dimana $0 < R^2 < 1$ dapat disimpulkan sebagai berikut:
 - Nilai R^2 yang kecil atau mendekati 0, berarti bahwa kemampuan dari variabel terikat dalam menjelaskan variabel bebas masih tergolong sangat lemah.
 - Nilai R^2 yang kecil atau mendekati 1, berarti bahwa kemampuan dari variabel terikat dalam menjelaskan variabel bebas tergolong sangat tinggi.
 -

Uji Asumsi Klasik

- 1) Uji Normalitas: pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah residual mengikuti distribusi normal atau tidak dalam penelitian. Dengan hipotesis bahwa H_0 residual mengikuti distribusi normal dan H_1 residual tidak mengikuti distribusi normal dalam data penelitian (Firman Alamsyah et al., 2022)
- 2) Uji Multikolinearitas: asumsi tidak adanya korelasi yang kuat antar variabel independen pada model regresi yang digunakan. Uji korelasi yang dilakukan memiliki nilai dari setiap variabel dibawah 0,80, maka asumsi multikolinearitas terpenuhi (Firman Alamsyah et al., 2022).
- 3) Uji Heteroskedastisitas: uji ini dilakukan dengan asumsi bahwa adanya kesamaan varians residual pada setiap level variabel bebas. Dengan hipotesis uji H_0 tidak terdapat masalah dengan heterokedastisitas, sedangkan H_1 menyatakan bahwa terdapat masalah dengan heterokedastisitas (Firman Alamsyah et al., 2022).
- 4) Uji Autokorelasi: untuk mengetahui ada atau tidaknya korelasi antar variabel dengan menggunakan uji yang dikenal dengan nama Durbin Watson. Dengan hipotesis H_0 maka tidak terjadi autokorelasi, dan H_1 maka terjadi autokorelasi dalam penelitian (Firman Alamsyah et al., 2022).

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil Penelitian

Pemilihan Model Terbaik dalam Regresi Data Panel

Pengujian estimasi ini dimulai melalui pendekatan pada model regresi yaitu, *Common Effect Model* (CEM), *Fixed Effect Model* (FEM), dan *Random Effect Model* (REM). Untuk dapat menentukan model mana yang terbaik, dilakukan beberapa pengujian yang terdiri dari tahapan berikut:

1. Uji Chow, uji ini digunakan untuk mengetahui model mana yang terbaik diantara CEM atau FEM. Berikut hasil dari uji Chow yang telah dilakukan dalam penelitian ini:

Tabel 1 Hasil Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	596.667643	(32,195)	0.0000
Cross-section Chi-square	1061.273543	32	0.0000

Sumber: Data diolah pada E-Views 12, 2024

Berdasarkan pada uji Chow yang telah dilakukan, maka diperoleh nilai probabilitas *cross-section* F sebesar 0.0000, yang berarti bahwa nilai tersebut lebih kecil atau kurang dari 0.05, sehingga dikatakan bahwa metode FEM lebih baik digunakan daripada metode CEM.

2. Uji Hausman, uji ini dilakukan untuk menentukan model yang terbaik antara FEM dan REM. Berikut hasil uji Hausman yang telah dilakukan dalam penelitian ini:

Tabel 2 Hasil Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
--------------	-------------------	--------------	-------

Cross-section random	22.437851	3	0.0001
----------------------	-----------	---	--------

Sumber: Data diolah pada E-Views 12, 2024

Berdasarkan uji Hausman yang telah dilakukan, maka diperoleh nilai probabilitas *cross-section random* yang sebesar 0.0001, yang berarti bahwa nilai tersebut lebih kecil atau kurang dari 0.05. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa estimasi yang terpilih dalam penelitian ini adalah metode FEM.

Setelah melakukan pengujian pada estimasi model regresi, yang kemudian diketahui bahwa pemodelan terbaik yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Fixed Effect Model* (FEM). Berikut merupakan hasil pengujian regresi data panel dengan menggunakan model terpilih yaitu FEM:

Tabel 3 Hasil Regresi Data Panel FEM

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.392970	0.071049	5.530991	0.0000
Log_PAD	-0.014939	0.005956	-2.508070	0.0130
Log_DBH	-0.003452	0.002748	-1.256229	0.2105
Log_DAU	-0.069579	0.017573	-3.959435	0.0001

Sumber: Data diolah pada E-Views 12, 2024

Uji Statistik

Uji F, dilakukan untuk mengetahui apakah secara bersama-sama variabel independen memiliki pengaruh yang secara signifikan mempengaruhi kepada variabel dependen. Berikut merupakan hasil dari uji F pada penelitian:

Tabel 4 Hasil Uji F

F-Statistic	696.8368
Prob (F-Statistic)	0.000000

Sumber: Data diolah pada E-Views 12, 2024

Maka dapat dikatakan bahwa secara simultan atau bersama-sama PAD, DBH, dan DAU secara signifikan mempengaruhi ketimpangan antarwilayah di 33 provinsi Indonesia.

Uji t, dilakukan untuk mengetahui adakah hubungan dan pengaruh yang signifikan dari variabel independen secara individu terhadap variabel dependen. Berikut merupakan hasil uji t pada penelitian.

Tabel 5 Hasil Uji t

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.392970	0.071049	5.530991	0.0000
Log_PAD	-0.014939	0.005956	-2.508070	0.0130
Log_DBH	-0.003452	0.002748	-1.256229	0.2105
Log_DAU	-0.069579	0.017573	-3.959435	0.0001

Sumber: Data diolah pada E-Views 12, 2024

Hasil menunjukkan bahwa pada variabel PAD H_a diterima, yang berarti bahwa variabel PAD berpengaruh secara signifikan terhadap ketimpangan antarwilayah di 33 provinsi di Indonesia. Sedangkan variabel DBH menunjukkan bahwa H_a ditolak, yang berarti bahwa variabel DBH tidak berpengaruh secara signifikan terhadap ketimpangan antarwilayah di 33 provinsi di Indonesia. Dan

hasil dari variabel DAU menunjukkan bahwa H_0 diterima, yang berarti bahwa variabel DAU memiliki pengaruh secara signifikan terhadap ketimpangan antarwilayah di 33 provinsi di Indonesia.

Uji Koefisien Determinasi (R^2), dilakukan untuk mengukur sejauh mana pengaruh dari variasi variabel independen mampu untuk menerangkan dengan baik variabel dependen. Menurut hasil regresi yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa nilai dari *Adjusted R-squared* sebesar 0.990644, yang diindikasikan bahwa nilai tersebut sekitar 99,06%. Variabel ketimpangan antarwilayah di 33 provinsi Indonesia mampu dijelaskan secara bersamaan dari variabel PAD, DBH, DAU. Sementara itu, sekitar 0,94% diterangkan oleh variabel lainnya yang tidak termasuk dalam model penelitian.

Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas, dalam penelitian ini menunjukkan hasil nilai *Jarque-Bera*-nya adalah sebesar 5.193236 dan probabilitasnya 0.074525. Maka dengan demikian, data yang ada dalam penelitian ini telah terdistribusi normal dan tidak terindikasi adanya masalah normalitas karena nilai dari probabilitasnya lebih dari 0.05.
2. Uji Multikolinearitas, hasil dari pengujian menunjukkan bahwa nilai koefisien korelasi dari setiap variabel independen tidak ada yang lebih dari 0.80, maka dapat dikatakan bahwa pada penelitian yang dilakukan ini tidak terdapat permasalahan yang terkait dengan multikolinearitas antar variabel independen.
3. Uji Heteroskedastisitas, pada pengujian ini dilakukan dengan uji Glejser, yaitu uji yang dilakukan dengan cara melakukan regresi pada absolut residual dengan variabel independen (Almuazam & Sirait, 2020). Hasil menunjukkan bahwa semua variabel independen dalam penelitian ini memiliki nilai probabilitas lebih dari nilai syarat signifikansi 0.05. Berarti model dalam penelitian ini tidak terdapat permasalahan yang terkait dengan heteroskedastisitas.
4. Uji Autokorelasi, hasil menunjukkan menunjukkan nilai dari Durbin-Watson stat sebesar 0.970326, yang artinya bahwa penelitian yang dilakukan tidak terdapat masalah yang terkait dengan autokorelasi karena nilai dari Durbin-Watson nya berada di antara -2 hingga 2.

Pembahasan

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Ketimpangan Antarwilayah di Indonesia

Berdasarkan hasil dari pengujian yang telah dilakukan menunjukkan adanya pengaruh secara negatif dan signifikan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap ketimpangan antarwilayah di 33 provinsi yang ada di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwasannya apabila PAD mengalami peningkatan secara signifikan, maka secara rata-rata hal ini akan menurunkan ketimpangan antarwilayah di 33 provinsi Indonesia. Temuan ini terbukti dapat memperkuat teori federalisme fiskal yang dikemukakan oleh Musgrave (1959) dan Oates (1972), dimana mereka sama-sama berpendapat bahwa desentralisasi fiskal, yang didalamnya memuat pendapatan daerah seperti PAD, akan dapat meningkatkan efisiensi dan pemerataan pembangunan ekonomi melalui pengelolaan keuangan yang baik oleh pemerintah daerah (Slavinskaitė et al., 2019). Hasil dari penelitian ini juga dinilai lebih mendukung adanya teori Hipotesis Neo-Klasik karena dapat menunjukkan adanya proses konvergensi ekonomi yang terjadi. Jika PAD kuat dan lebih baik maka akan dapat membantu mengurangi terjadinya ketimpangan pembangunan yang ada antarwilayah. Menurut studi empiris, penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fadli (2016) yang mengatakan bahwa PAD berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap ketimpangan wilayah di provinsi Indonesia. Hal ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Qibthiyah (2017) yang mengatakan PAD Provinsi berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap ketimpangan ekonomi intra-provinsi di Indonesia.

Pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Ketimpangan Antarwilayah di Indonesia

Berdasarkan hasil dari pengujian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa adanya pengaruh secara tidak signifikan dari Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap ketimpangan antarwilayah di 33 provinsi yang ada di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa apabila DBH mengalami peningkatan, maka secara rata-rata hal ini akan menurunkan ketimpangan antarwilayah di 33 provinsi Indonesia, namun adanya peningkatan tersebut tidak akan berpengaruh secara signifikan terhadap penurunan yang terjadi pada ketimpangan antarwilayah. Temuan dalam penelitian belum mampu untuk memperkuat teori federalisme fiskal, karena sebagai salah satu fungsi utama transfer fiskal dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah adalah guna mengurangi ketimpangan antarwilayah melalui redistribusi pendapatan. DBH dinilai belum mampu untuk mendukung pemerataan pembangunan dengan mengalokasikan pendapatan wilayah yang bersumber dari keunggulan yang ada di wilayah tersebut. Temuan ini juga belum mampu untuk memperkuat teori dari Hipotesis Neo-Klasik yang berpendapat bahwa jika dalam jangka panjang, pemerataan ekonomi akan terjadi. Maka DBH pada penelitian ini dinilai masih belum mampu untuk dapat meningkatkan pemerataan dengan membantu wilayah tertinggal untuk dapat mengejar ketertinggalan yang terjadi. Hasil penelitian ini dinilai sejalan dengan teori Myrdal (1957) yang mengasumsikan bahwa ketimpangan akan semakin besar tanpa adanya upaya redistribusi yang lebih efektif. Menurut studi empiris, hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Qibthiyah, (2017) yang menunjukkan bahwa DBH tidak berpengaruh secara signifikan terhadap ketimpangan ekonomi intra-provinsi di Indonesia. Didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Sidik, et al. (2020) yang menyatakan bahwa DBH memiliki hubungan yang tidak signifikan terhadap ketimpangan antar daerah di Provinsi Jambi.

Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Ketimpangan Antarwilayah di Indonesia

Berdasarkan hasil dari pengujian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa adanya pengaruh secara negatif dan signifikan dari Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap ketimpangan antarwilayah di 33 provinsi yang ada di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwasannya apabila DAU mengalami peningkatan secara signifikan, maka secara rata-rata hal ini akan menurunkan ketimpangan antarwilayah di 33 provinsi Indonesia. Temuan ini mendukung teori federalisme fiskal karena DAU berfungsi sebagai alat redistribusi yang efektif. DAU juga didistribusikan guna mengurangi kesenjangan fiskal antarwilayah, sehingga memungkinkan nantinya kemampuan wilayah dapat diusahakan menjadi lebih merata (Sjafrizal, 2017). Maka temuan penelitian ini dinilai juga sejalan dengan teori Hipotesis Neo-Klasik, karena dengan adanya alokasi DAU kepada wilayah yang memiliki PAD atau sumber pendapatan yang sedikit, diharapkan dapat mendorong kegiatan perekonomian di wilayah tersebut dan nantinya akan mendorong pembangunan. Sehingga, wilayah yang tertinggal itu nantinya akan dapat mengejar ketertinggalannya pada wilayah maju dan menurunkan tingkat ketimpangan yang ada antarwilayah di Indonesia. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Fadli (2016), yang mengatakan bahwa DAU berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap ketimpangan wilayah di provinsi Indonesia, Alfiansyah & Budyandra, (2020), yang mengatakan bahwa DAU berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Penelitian yang dilakukan oleh Alfurqani et al., (2021), yang mengatakan bahwa DAU berdampak negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pembangunan di Provinsi Riau.

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan diskusi yang telah dilakukan oleh peneliti, berikut adalah kesimpulan yang diperoleh:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbukti memiliki kontribusi yang besar terhadap penurunan ketimpangan antarwilayah pada 33 provinsi di Indonesia. Artinya peningkatan PAD ini

memungkinkan wilayah untuk menginvestasikan lebih banyak pendapatannya pada infrastruktur dan layanan publik, yang akan membantu dalam meningkatkan kualitas dan pembangunan yang ada pada wilayah yang tertinggal.

2. Dana Bagi Hasil (DBH) terbukti belum berkontribusi terhadap penurunan ketimpangan antarwilayah pada 33 provinsi di Indonesia. Artinya, peningkatan alokasi DBH tidak selalu efektif dalam menjangkau wilayah-wilayah yang tertinggal dan membutuhkan. Meskipun, DBH dirancang untuk mendistribusikan pendapatan dari sumber daya alam dan pajak, masih banyak wilayah yang tidak memiliki kapasitas yang memadai dalam mengelola dan memanfaatkan dana tersebut secara optimal untuk kegiatan pembangunan.
3. Dana Alokasi Umum (DAU) terbukti memiliki kontribusi yang besar terhadap penurunan ketimpangan antarwilayah pada 33 provinsi di Indonesia. Artinya, peningkatan DAU terjadi karena pemerintah pusat memberikan dukungan finansial yang lebih besar terhadap wilayah yang kurang berkembang. Maka hal ini mengurangi ketergantungan mereka pada sumber daya internal yang terbatas, sehingga mereka dapat lebih mandiri dalam mengelola keuangan dan mengembangkan pembangunan pada infrastruktur.

Daftar Pustaka

- Adriana, M. (2020). Analisis Ketimpangan Antar Provinsi Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 79.
- Akhadi, I. (2023). Pengaruh Belanja Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa (Tkdd) Terhadap Ketimpangan Pembangunan Di Indonesia. *E-Journal Akuntansi TSM*, 3(4), 197–212.
- Alfiansyah, H., & Budyanra, B. (2020). Analisis Ketimpangan Pembangunan Antarkabupaten/Kota Di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013-2017. *Seminar Nasional Official Statistics*, 1, 424–429.
- Alfurqani, Z. H., Widiarsih, D., & Algusri, J. (2021). Pengaruh Dana Alokasi Umum, Belanja Modal Dan Investasi Terhadap Ketimpangan Pembangunan Antar Kabupaten/Kota Di Provinsi Riau. *Economics, Accounting and Business Journal*, 1(1), 295–307.
- Almuazam, R. G., & Sirait, T. (2020). Pemodelan Regresi Panel Spasial Pengaruh Kebijakan Desentralisasi Fiskal Terhadap Ketimpangan Pendapatan Antarkabupaten / kota di Provinsi Papua Tahun 2015-2020. *Seminar Nasional Official Statistics*, 741–750.
- Azizi, M. (2018). Dampak Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil Terhadap Ketimpangan Produk Domestik Regional Bruto di Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2005 – 2014. *Jurnal Kritis*, II(1), 1–32.
- Bird, R. M., & Vaillancourt, F. (1998). Fiscal Decentralization in Developing Countries. In *Encyclopedia of Public Administration and Public Policy, Third Edition* (pp. 770–775).
- Chenge, A. A. (2024). Exploring Fiscal Federalism and the Structure of Public Spending in Nigeria. *Journal of Political Science*, 24, 86–102.
- Deslina. (2024). IMPLEMENTASI DESENTRALISASI FISKAL BERDASARKAN UU NO. 1 TAHUN 2022. *Kementerian Keuangan RI*.
- Fadli, F. (2016). Fiscal Decentralization and Regional Disparity in East and West Indonesia's Provinces. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 14(1), 1–17.
- Firman Alamsyah, I., Esra, R., Awalia, S., Andi Nohe, D., Matematika, J., & Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, F. (2022). Analisis Regresi Data Panel Untuk Mengetahui Faktor Yang Memengaruhi Jumlah Penduduk Miskin Di Kalimantan Timur. *Prosiding Seminar Nasional Matematika, Statistika, Dan Aplikasinya*, 254–266.

- Gratia, Y. C., & SBM, N. (2020). Analisis Ketimpangan Antar Wilayah Di 35 Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya. *Diponegoro Journal of Economics*, 9(2), 31–40.
- Lamba, A., Allo, P. K., & Lamba, R. A. (2019). Effect of fiscal decentralization policy of regional economic imbalances towards economy growth in Eastern Indonesia. *International Journal of Social Sciences and Humanities*, 3(2), 112–127.
- Muammil, S., & Senuk, A. (2015). *Ekonomi Pembangunan Daerah* (1st ed.). Mitra Wacana Media.
- Nasution, M. (2020). Ketimpangan Antar Wilayah & Hubungannya dengan Belanja Pemerintah: Studi di Indonesia. *Jurnal Budget : Isu Dan Masalah Keuangan Negara*, 5(2), 84–102.
- Oktaviani, W., Zulgani, Z., & Rosmeli, R. (2017). Pengaruh dana perimbangan terhadap ketimpangan pembangunan di Provinsi Jambi. *E-Jurnal Perspektif Ekonomi Dan Pembangunan Daerah*, 6(3), 105–112.
- Sabilla, K., & Kirana Jaya, W. (2014). Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Per Kapita Regional Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 15(1), 12–22.
- Santi, S. D., & Iskandar, D. A. (2021). Kebijakan Desentralisasi dan Ketimpangan Capaian Pembangunan Wilayah Di Indonesia. *Jurnal Syntax Admiration*, 2(3), 490–506.
- Savitri, D. A., & Ashar, K. (2023). Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Ketimpangan Perekonomian Di Jawa Timur. *Journal of Development Economic and Social Studies*, 2(2), 327–340.
- Sidig, D. S. (2018). Desentralisasi Fiskal dan Kesenjangan Pendapatan antar Provinsi di Indonesia. *Symposium Nasional Keuangan Negara*, 1(1), 978–1001.
- Sidik, M., Hidayat, S., & Ridwansyah, M. (2020). Dampak alokasi dana perimbangan (DAU, DAK, DBH) terhadap tingkat ketimpangan antar daerah di Provinsi Jambi Periode 2010-2019. *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 15(2), 229–238.
- Sisilia, M., & Harsono, H. (2021). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Malang Tahun 2010- 2019. *Journal of Regional Economics Indonesia*, 2(1), 57–70.
- Sjafrizal. (2017). *Ekonomi Wilayah dan Perkotaan* (1st ed.). Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Sjafrizal. (2018). *Analisis Ekonomi Regional dan Penerapannya di Indonesia* (1st ed.). PT Rajagrafindo Persada.
- Slavinskaitė, N., Liučvaitienė, A., & Gedvilaitė, D. (2019). Theoretical Analysis of The Fiscal Federalism. *International Journal of Contemporary Economics and Administrative Sciences*, 9(2), 250–267.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2015). Economic Development. In Addison-Wesley (Ed.), *Pearson* (11th ed.). Pearson Education, Inc.
- Wei, Y. D. (2015). Spatiality of regional inequality. *Applied Geography*, 61, 1–10.
- Widodo, S. (2022). Pengaruh Pad, Dau, Dbh, Dak, Penerimaan Pembiayaan Dan Penanaman Modal Tetap Bruto Terhadap Alokasi Belanja Modal Daerah Provinsi Kawasan Barat Dan Timur Indonesia. *Jurnal Budget : Isu Dan Masalah Keuangan Negara*, 4(1), 1–23.